EFEKTIVITAS PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENINGKATKAN NILAI INDEKS DESA MEMBANGUN (STUDI KOMPARASI DESA BILUHU BARAT KECAMATAN BILUHU DAN DESA HULAWA KECAMATAN TELAGA KABUPATEN GORONTALO)

Mohammad Renaldi Biga
NPP.33.0995
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: renaldibiga@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Rossy Lambelanova, AP, S.IP.,M.Si
Email: rossylambelanova@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Most previous research on the role of the Village Consultative Body (BPD) has focused on its function in village governance, such as supervision, channeling community aspirations, and village development planning. Research examining the direct relationship between BPD effectiveness and IDM is still limited. Comparative studies involving villages with contrasting IDM status are still rare. This research addresses this gap by comparing the effectiveness of BPD in West Biluhu Village and Hulawa Village, which have very different IDM achievements. This study aims to: (1) analyze the effectiveness of BPD in improving IDM scores in Desa Biluhu Barat and Desa Hulawa; (2) identify factors causing differences in BPD effectiveness between the two villages; and (3) examine efforts undertaken by BPD to support village development and improve IDM performance. This study uses a comparative qualitative approach. Biluhu Barat Village and Hulawa Village were selected because they are under the same local governance system but have different IDM achievements. Data were obtained through in-depth interviews, observation, and documentation of eight purposively selected informants, consisting of the BPD Chairperson, Village Head, Village Secretary, and community leaders in each village. Data analysis was conducted using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. Preliminary findings indicate that BPD effectiveness differs considerably between the two villages. In Desa Biluhu Barat, BPD participation in planning, supervision, and community representation remains limited, contributing to a lower IDM score (0.5990; underdeveloped status). Conversely, Desa Hulawa demonstrates active and collaborative BPD involvement, strong community participation, transparent governance, and a high IDM score (0.9511; independent status). The study concludes that effective BPD performance significantly contributes to higher IDM achievement through participatory governance, transparency, and responsive development policies. Strengthening BPD capacity is therefore essential for improving village development outcomes and accelerating progress toward advanced and independent village status.

Keywords*: Community Participation; Comparative Study Village Consultative Body (BPD); Institutional Effectiveness; Village Development; Village Development Index (IDM); Village Governance*

ABSTRAK

Sebagian besar penelitian sebelumnya tentang peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah berfokus pada fungsinya dalam tata kelola desa, seperti pengawasan, saluran aspirasi masyarakat, dan perencanaan pembangunan desa. Penelitian yang meneliti hubungan langsung antara efektivitas BPD dan IDM masih terbatas. Studi komparatif yang melibatkan desa-desa dengan status IDM yang kontras masih jarang. Penelitian ini mengatasi kesenjangan tersebut dengan membandingkan efektivitas BPD di Desa Biluhu Barat dan Desa Hulawa, yang memiliki pencapaian IDM yang sangat berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis efektivitas BPD dalam meningkatkan skor IDM di Desa Biluhu Barat dan Desa Hulawa; (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan efektivitas BPD antara kedua desa tersebut; dan (3) meneliti upaya yang dilakukan oleh BPD untuk mendukung pembangunan desa dan meningkatkan kinerja IDM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif komparatif. Desa Biluhu Barat dan Desa Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif komparatif. Desa Biluhu Barat dan Desa Hulawa dipilih karena berada dalam sistem tata kelola pemerintahan daerah yang sama tetapi memiliki capaian IDM yang berbeda. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap 8 informan yang dipilih secara purposive, terdiri atas Ketua BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan tokoh masyarakat pada masing-masing desa. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Temuan awal menunjukkan bahwa efektivitas BPD berbeda secara signifikan antara kedua desa. Di Desa Biluhu Barat, partisipasi BPD dalam perencanaan, pengawasan, dan representasi masyarakat masih terbatas, yang berkontribusi pada skor IDM yang lebih rendah (0,5990; status terbelakang). Sebaliknya, Desa Hulawa menunjukkan keterlibatan BPD yang aktif dan kolaboratif, partisipasi masyarakat yang kuat, tata kelola yang transparan, dan skor IDM yang tinggi (0,9511; status mandiri). Studi ini menyimpulkan bahwa kinerja BPD yang efektif secara signifikan berkontribusi pada pencapaian IDM yang lebih tinggi melalui tata kelola partisipatif, transparansi, dan kebijakan pembangunan yang responsif. Oleh karena itu, penguatan kapasitas BPD sangat penting untuk meningkatkan hasil pembangunan desa dan mempercepat kemajuan menuju status desa maju dan mandiri.

Kata kunci: Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Efektivitas Kelembagaan, Indeks Pembangunan Desa (IDM), Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Desa, Studi Komparatif, Tata Kelola Desa

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan wilayah, serta memperkuat kapasitas pemerintahan lokal (Castañeda-Barba et al., 2024; Chung et al., 2022). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengelola pembangunan berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal (Jiang et al., 2021; Lechner et al., 2022). Keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya dan dukungan anggaran, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas kelembagaan desa, khususnya

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat (Tohawi & Suhaimi, 2022; Yanan et al., 2024). Untuk mengukur tingkat kemajuan desa secara nasional, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengembangkan Indeks Desa Membangun (IDM) sejak tahun 2015 (Aspinall et al., 2025; Indrawanto et al., 2025). IDM menjadi instrumen penting dalam menilai keberhasilan pembangunan desa melalui tiga dimensi utama, yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan (Ginting et al., 2024; Karuniyati et al., 2021). Melalui indikator tersebut, status desa diklasifikasikan ke dalam kategori sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri (Soegiharto et al., 2026; Syukri, 2025). IDM berfungsi sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan (Guerrero, 2024; Praja et al., 2025). Kabupaten Gorontalo menunjukkan dinamika pembangunan desa yang menarik untuk dikaji. Data IDM tahun 2024 memperlihatkan masih adanya kesenjangan capaian pembangunan, dengan 38 desa berstatus berkembang, 95 desa berstatus maju, dan 60 desa berstatus mandiri. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan pembangunan desa belum berlangsung secara merata. Perbedaan capaian tersebut menunjukkan adanya variasi kapasitas tata kelola pemerintahan desa, tingkat partisipasi masyarakat, kualitas pelayanan publik, serta efektivitas peran BPD dalam mendukung pembangunan desa (Ali et al., 2026; Muhtar et al., 2023).

Kesenjangan capaian tersebut menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor internal desa yang memengaruhi keberhasilan pembangunan (Li et al., 2022; Yu et al., 2025). Meskipun pemerintah daerah telah memberikan dukungan kebijakan dan program pembangunan yang relatif sama, hasil yang dicapai oleh setiap desa tidak selalu menunjukkan perkembangan yang seragam (Bi & Yang, 2023; Hilmawan et al., 2023). Kondisi ini mengindikasikan perlunya kajian yang lebih mendalam terhadap aspek tata kelola pemerintahan desa dan efektivitas lembaga-lembaga desa yang berperan dalam proses pembangunan (Christou et al., 2024; Fralish et al., 2024). Dalam praktiknya, keberhasilan pembangunan desa sering kali menunjukkan capaian yang berbeda antarwilayah meskipun berada dalam kerangka regulasi yang sama (Li et al., 2022; Liu et al., 2022). Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh kapasitas pemerintahan desa, kualitas kepemimpinan, tingkat partisipasi masyarakat, serta efektivitas lembaga desa dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya (Zang et al., 2023; Zhang et al., 2022). Penguatan kelembagaan desa menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat (Harsanto & Wahyuningrat, 2024; Patnaik et al., 2020).

Penelitian ini berfokus pada Desa Biluhu Barat Kecamatan Biluhu dan Desa Hulawa Kecamatan Telaga karena keduanya berada dalam lingkungan regulasi dan kebijakan yang sama, namun menunjukkan capaian pembangunan yang berbeda. Desa Biluhu Barat mengalami kecenderungan stagnasi bahkan penurunan nilai IDM, sedangkan Desa Hulawa berhasil mencapai status desa mandiri dengan peningkatan nilai IDM yang konsisten. Perbedaan tersebut memberikan ruang analisis yang kuat untuk mengkaji bagaimana efektivitas peran BPD memengaruhi pencapaian pembangunan desa. Pendekatan komparatif digunakan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, faktor penyebab, serta praktik kelembagaan yang memengaruhi efektivitas peran BPD dalam meningkatkan nilai IDM. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian pemerintahan desa serta menjadi rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam memperkuat kapasitas BPD sebagai mitra strategis pembangunan desa yang partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Tabel 1
Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2021-2024 Desa Biluhu Barat dan Desa Hulawa

Desa	Nilai dan Status IDM 2021	Nilai dan Status IDM 2022	Nilai dan Status IDM 2023	Nilai dan Status IDM 2024
Desa Biluhu Barat	0,6052 (Berkembang)	0,6052 (Berkembang)	0,6224 (Berkembang)	0,5990 (Tertinggal)
Desa Hulawa	0,7711 (Maju)	0,8752 (Mandiri)	0,8863 (Mandiri)	0,9511 (Mandiri)

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gorontalo, 2026.

Untuk memperkuat urgensi penelitian, peneliti melakukan observasi awal pada kedua desa yang menjadi lokasi penelitian. Hasil observasi menunjukkan adanya perbedaan kondisi tata kelola pembangunan desa antara Desa Biluhu Barat dan Desa Hulawa. Meskipun kedua desa berada dalam wilayah Kabupaten Gorontalo dan berada di bawah regulasi pemerintahan yang sama, pelaksanaan pembangunan desa menunjukkan capaian yang berbeda. Perbedaan tersebut terlihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, intensitas koordinasi antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta keterlibatan BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi masyarakat.

Temuan awal tersebut diperkuat oleh data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2024 yang menunjukkan adanya kesenjangan capaian pembangunan antara kedua desa. Desa Biluhu Barat memperoleh nilai IDM sebesar 0,5990 dengan status tertinggal, sedangkan Desa Hulawa memperoleh nilai IDM sebesar 0,9511 dengan status mandiri. Perbedaan capaian tersebut mengindikasikan bahwa terdapat faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pembangunan desa, baik dari aspek tata kelola pemerintahan, partisipasi masyarakat, maupun efektivitas kelembagaan desa. Berdasarkan hasil observasi awal, BPD di Desa Hulawa terlihat lebih aktif dalam mengawal proses perencanaan pembangunan, menyerap aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program desa. Sebaliknya, pada Desa Biluhu Barat masih ditemukan beberapa kendala yang berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi BPD dalam mendukung pembangunan desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat dapat menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan desa dan peningkatan nilai IDM.

Untuk memperkuat urgensi penelitian, hasil observasi awal dan data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2024 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara Desa Biluhu Barat dan Desa Hulawa di Kabupaten Gorontalo. Desa Biluhu Barat memperoleh nilai IDM sebesar 0,5990 dengan status tertinggal, sedangkan Desa Hulawa mencapai nilai 0,9511 dengan status mandiri. Perbedaan tersebut mengindikasikan adanya variasi dalam efektivitas tata kelola pembangunan desa, khususnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hasil observasi menunjukkan bahwa BPD di Desa Hulawa berperan lebih aktif dalam perencanaan, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat dibandingkan Desa Biluhu Barat. Penelitian ini penting karena masih terbatasnya kajian yang menghubungkan efektivitas peran BPD dengan capaian IDM secara komparatif. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam penguatan tata kelola pembangunan desa berbasis kinerja kelembagaan dan indikator pembangunan nasional.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (*Research Gap*)

Penelitian mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah banyak dilakukan dengan fokus pada pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi penyaluran aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas BPD dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, kualitas sumber

daya manusia, pola hubungan dengan pemerintah desa, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menilai keberhasilan BPD berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam tata kelola pemerintahan desa, seperti penyusunan peraturan desa, pengawasan penggunaan anggaran desa, dan fasilitasi aspirasi masyarakat. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berorientasi pada aspek kelembagaan dan tata kelola pemerintahan desa, sehingga belum secara spesifik mengkaji keterkaitan antara efektivitas peran BPD dengan capaian pembangunan desa yang terukur melalui Indeks Desa Membangun (IDM). Padahal, IDM merupakan indikator nasional yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan desa berdasarkan dimensi ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan. Dengan demikian, masih terdapat keterbatasan penelitian dalam menjelaskan sejauh mana efektivitas pelaksanaan fungsi BPD berkontribusi terhadap peningkatan nilai IDM.

Selain itu, penelitian terdahulu umumnya menggunakan pendekatan studi kasus pada satu desa sehingga hasil penelitian lebih banyak menggambarkan kondisi lokal tertentu dan belum memungkinkan dilakukan perbandingan antar desa yang memiliki tingkat perkembangan berbeda. Akibatnya, faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan efektivitas peran BPD dalam mendukung pembangunan desa belum dapat dijelaskan secara komprehensif. Penelitian komparatif yang membandingkan efektivitas BPD pada desa dengan capaian IDM yang kontras masih relatif terbatas. Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat tiga kesenjangan penelitian yang menjadi dasar pelaksanaan penelitian ini. Pertama, masih terbatasnya penelitian yang menghubungkan efektivitas peran BPD dengan capaian Indeks Desa Membangun (IDM). Kedua, masih minimnya penelitian yang menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan efektivitas BPD pada desa dengan tingkat perkembangan yang berbeda. Ketiga, belum banyak penelitian yang mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan efektivitas BPD dalam mendukung pembangunan desa dan peningkatan IDM.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran dan program pembangunan, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas kelembagaan desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pengawasan, dan partisipasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki posisi strategis sebagai lembaga yang mewakili masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta penyaluran aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas peran BPD menjadi salah satu faktor yang berpotensi memengaruhi keberhasilan pembangunan desa yang tercermin melalui capaian Indeks Desa Membangun (IDM).

Urgensi penelitian ini semakin kuat karena terdapat perbedaan capaian IDM yang cukup signifikan antara Desa Biluhu Barat dan Desa Hulawa di Kabupaten Gorontalo. Meskipun kedua desa berada dalam lingkungan regulasi, kebijakan, dan sistem pemerintahan daerah yang sama, hasil pembangunan yang dicapai menunjukkan kondisi yang berbeda. Desa Biluhu Barat mengalami penurunan status IDM menjadi desa tertinggal, sedangkan Desa Hulawa mampu mempertahankan status desa mandiri dengan nilai IDM yang terus meningkat. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya faktor-faktor tertentu yang memengaruhi keberhasilan pembangunan desa dan perlu dikaji secara mendalam, khususnya yang berkaitan dengan efektivitas peran BPD. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu pemerintahan, khususnya mengenai efektivitas kelembagaan desa dan kontribusinya terhadap pembangunan desa. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian

selanjutnya yang membahas hubungan antara tata kelola pemerintahan desa, efektivitas BPD, dan capaian pembangunan desa yang diukur melalui Indeks Desa Membangun (IDM).

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Gorontalo, pemerintah desa, dan Badan Permusyawaratan Desa dalam merumuskan strategi penguatan kapasitas kelembagaan BPD. Temuan penelitian dapat digunakan sebagai dasar dalam meningkatkan fungsi pengawasan, penyaluran aspirasi masyarakat, koordinasi antar lembaga desa, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sehingga mampu mendorong peningkatan nilai IDM secara berkelanjutan. Apabila permasalahan ini tidak diteliti, maka faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan efektivitas peran BPD dalam mendukung pembangunan desa akan sulit diidentifikasi secara objektif. Kondisi tersebut dapat menghambat upaya pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk memperkuat kelembagaan desa, mengurangi kesenjangan pembangunan antar desa, dan meningkatkan status perkembangan desa. Akibatnya, potensi pembangunan desa tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dan target peningkatan kesejahteraan masyarakat desa menjadi lebih sulit untuk dicapai.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai efektivitas peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti. Penelitian Bella et al. (2024) menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengawasi jalannya pemerintahan desa masih belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh rendahnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki anggota BPD (Bella et al., 2024). Penelitian Ardiansyah dan Rodiyah (2024) serta Chasanah dan Riyadh (2024) menemukan bahwa efektivitas BPD dalam mendukung perencanaan dan pembangunan desa masih menghadapi berbagai hambatan kelembagaan. Hambatan tersebut terutama berkaitan dengan lemahnya koordinasi antarlembaga desa dan belum maksimalnya pelaksanaan fungsi BPD dalam mengawal proses pembangunan desa (Ardiansyah & Rodiyah, 2024; Chasanah & Riyadh, 2024).

Sementara itu, penelitian Muhamad Hasanudin (2024), Agus Tohawi (2025), dan Ady Hermawansyah dkk. (2023) menegaskan bahwa BPD memiliki peran strategis dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Keberadaan BPD dipandang sebagai salah satu faktor penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik (good village governance), meskipun pelaksanaannya masih menghadapi hambatan kelembagaan, regulatif, dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (Hermawansyah et al., 2023; Tohawi, 2025).

Berdasarkan hasil telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai peran dan efektivitas BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa. Selain itu, sebagian besar penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami dinamika kelembagaan BPD dalam konteks pemerintahan desa. Namun demikian, terdapat perbedaan yang cukup mendasar. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada pelaksanaan fungsi BPD secara normatif, seperti fungsi pengawasan, legislasi, dan penyaluran aspirasi masyarakat, tanpa menghubungkannya secara langsung dengan capaian pembangunan desa yang terukur melalui indikator pembangunan nasional. Sebagian besar penelitian juga menggunakan pendekatan studi kasus pada satu desa sehingga belum mampu menjelaskan perbedaan efektivitas BPD pada desa dengan tingkat perkembangan yang berbeda.

Kelemahan penelitian terdahulu terletak pada masih terbatasnya kajian yang menghubungkan efektivitas peran BPD dengan capaian Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan desa. Selain itu, penelitian komparatif yang membandingkan efektivitas BPD pada desa dengan status IDM yang berbeda masih relatif jarang dilakukan. Akibatnya, faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan efektivitas BPD dalam mendukung pembangunan desa belum banyak terungkap secara komprehensif. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memberikan kontribusi dengan menganalisis efektivitas peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) melalui studi komparatif pada Desa Biluhu Barat Kecamatan Biluhu dan Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini tidak hanya mengkaji pelaksanaan fungsi BPD, tetapi juga menelaah keterkaitannya dengan capaian pembangunan desa yang diukur melalui IDM. Melalui pendekatan komparatif, penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan efektivitas BPD, menemukan praktik-praktik kelembagaan yang mendukung keberhasilan pembangunan desa, serta memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi penguatan tata kelola pemerintahan desa yang berorientasi pada peningkatan status dan kemandirian desa.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan ilmiah (*novelty*) penelitian ini tidak hanya terletak pada pemilihan objek penelitian dan penggunaan pendekatan komparatif, tetapi juga pada kontribusi teoritis dan empiris yang ditawarkan dalam kajian efektivitas organisasi dan pemerintahan desa. Secara teoritis, penelitian ini mengembangkan penerapan teori efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh Duncan dalam Steers (1985) pada konteks kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selama ini teori efektivitas organisasi lebih banyak digunakan untuk menilai kinerja organisasi formal, sedangkan penelitian ini mengaplikasikan dimensi pencapaian tujuan (*goal attainment*), integrasi (*integration*), dan adaptasi (*adaptation*) untuk menganalisis efektivitas lembaga representatif desa dalam mendukung pembangunan desa. Dengan demikian, penelitian ini memperluas penggunaan teori efektivitas organisasi pada ranah pemerintahan desa dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara efektivitas kelembagaan dan capaian pembangunan desa.

Secara empiris, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menghubungkan efektivitas peran BPD secara langsung dengan capaian Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai indikator nasional yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan desa. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya hanya menilai pelaksanaan fungsi BPD dari aspek pengawasan, legislasi, dan penyaluran aspirasi masyarakat, penelitian ini menganalisis bagaimana efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan status dan nilai IDM. Pendekatan ini memungkinkan diperolehnya penjelasan yang lebih konkret mengenai kontribusi kelembagaan BPD terhadap keberhasilan pembangunan desa yang terukur. Selain itu, penelitian ini menghasilkan pemahaman empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan efektivitas peran BPD melalui studi komparatif antara Desa Biluhu Barat dan Desa Hulawa Kabupaten Gorontalo yang memiliki capaian IDM berbeda secara signifikan. Analisis komparatif tersebut memungkinkan identifikasi praktik-praktik kelembagaan yang mendukung keberhasilan pembangunan desa, faktor penghambat efektivitas BPD, serta pola hubungan antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mendorong peningkatan kualitas pembangunan desa. Temuan tersebut diharapkan dapat memperkaya pengembangan kajian pemerintahan desa sekaligus menjadi dasar perumusan strategi penguatan kapasitas BPD dalam mendukung pembangunan desa yang partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan.

1.6. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) di Desa Biluhu Barat dan Desa Hulawa, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan efektivitas peran BPD pada kedua desa, serta menjelaskan berbagai upaya yang dilakukan BPD dalam mendukung peningkatan nilai IDM.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif komparatif untuk memahami secara mendalam efektivitas peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan Indeks Desa Membangun (IDM) pada Desa Biluhu Barat dan Desa Hulawa Kabupaten Gorontalo (Adiwijaya et al., 2024; Anto et al., 2024). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap proses, dinamika kelembagaan, pola interaksi, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas peran BPD dalam konteks sosial yang berbeda (Riasnugrahani & Analya, 2023; Sugiyono, 2019). Fokus penelitian tidak hanya diarahkan pada capaian akhir berupa nilai IDM, tetapi juga pada bagaimana fungsi legislasi, pengawasan, penyaluran aspirasi, serta koordinasi antara BPD dan pemerintah desa dijalankan dalam mendukung pembangunan desa. Desain deskriptif komparatif digunakan untuk membandingkan efektivitas peran BPD pada dua desa yang memiliki capaian IDM berbeda. Melalui perbandingan tersebut, penelitian berupaya mengidentifikasi persamaan, perbedaan, faktor pendukung, dan faktor penghambat yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan fungsi BPD dalam pembangunan desa. Analisis dilakukan menggunakan perspektif efektivitas organisasi Richard M. Steers yang mencakup dimensi pencapaian tujuan (*goal attainment*), integrasi (*integration*), dan adaptasi (*adaptation*).

Operasionalisasi konsep penelitian diarahkan pada pengukuran efektivitas peran BPD melalui sejumlah indikator yang relevan. Dimensi pencapaian tujuan dianalisis melalui kesesuaian program kerja BPD dengan perencanaan pembangunan desa, kontribusi terhadap peningkatan IDM, serta ketercapaian sasaran pembangunan sesuai aspirasi masyarakat. Dimensi integrasi difokuskan pada kualitas koordinasi antara BPD dan pemerintah desa, keharmonisan hubungan kelembagaan, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dimensi adaptasi dianalisis melalui kemampuan BPD merespons perubahan kebutuhan pembangunan, menyesuaikan diri terhadap regulasi baru, dan menyelaraskan program kerja dengan prioritas pembangunan desa. Data penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan interaksi langsung dengan informan yang terlibat dalam proses pembangunan desa. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan tingkat pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Informan utama terdiri atas Ketua BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta pihak lain yang dianggap memiliki informasi relevan. Apabila diperlukan, penentuan informan dikembangkan melalui teknik *snowball sampling* guna memperoleh data yang lebih kaya dan komprehensif. Data sekunder diperoleh dari dokumen RPJMDes, RKPDes, APBDes, laporan realisasi pembangunan, dokumen kinerja BPD, data IDM, peraturan perundang-undangan, serta berbagai literatur ilmiah yang mendukung penelitian.

Penentuan jumlah informan dalam penelitian ini tidak didasarkan pada jumlah tertentu sebagaimana penelitian kuantitatif, melainkan pada prinsip kejenuhan data (*data saturation*). Pengumpulan data dilakukan secara bertahap hingga informasi yang diperoleh dari informan tidak lagi menunjukkan tema, kategori, atau temuan baru yang signifikan terkait efektivitas peran

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan desa. Pada kondisi tersebut, data dianggap telah mencapai titik jenuh sehingga proses penambahan informan dihentikan. Dengan demikian, kecukupan informan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan kedalaman, kelengkapan, dan keterulangan informasi yang diperoleh untuk menjawab fokus penelitian secara komprehensif.

Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri yang berperan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data. Untuk mendukung proses tersebut digunakan pedoman wawancara, pedoman observasi, dan pedoman dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif pasif, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi. Ketiga teknik tersebut saling melengkapi sehingga mampu menghasilkan data yang mendalam dan sesuai dengan fokus penelitian. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Proses analisis berlangsung secara berulang dan simultan selama penelitian. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, serta konfirmasi hasil kepada informan. Penelitian dilaksanakan di Desa Biluhu Barat Kecamatan Biluhu dan Desa Hulawa Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, karena kedua desa menunjukkan karakteristik dan capaian IDM yang berbeda sehingga relevan untuk dianalisis secara komparatif dalam menilai efektivitas peran BPD terhadap pembangunan desa.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member check. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, seperti Ketua BPD, anggota BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Informasi mengenai pelaksanaan fungsi BPD, proses pembangunan desa, serta kontribusi terhadap peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) dibandingkan antar sumber untuk mengetahui tingkat konsistensi data dan mengidentifikasi perbedaan persepsi yang muncul.

Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informasi hasil wawancara mengenai pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi oleh BPD diverifikasi melalui observasi langsung terhadap kegiatan musyawarah desa, rapat BPD, serta aktivitas pembangunan desa. Selain itu, data hasil wawancara dan observasi juga diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen resmi seperti RPJMDes, RKPDes, APBDes, laporan realisasi pembangunan, notulen rapat BPD, dan dokumen Indeks Desa Membangun (IDM). Verifikasi data dilakukan secara berkelanjutan selama proses penelitian. Temuan-temuan sementara yang diperoleh dari hasil wawancara dikonfirmasi kembali melalui observasi lapangan dan pemeriksaan dokumen yang relevan. Selanjutnya, peneliti melakukan member check dengan meminta beberapa informan kunci untuk meninjau kembali ringkasan hasil wawancara guna memastikan bahwa informasi yang dicatat telah sesuai dengan maksud dan pengalaman informan. Melalui proses tersebut, data yang digunakan dalam penelitian diharapkan memiliki tingkat kredibilitas, konsistensi, dan keakuratan yang tinggi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Efektivitas peran BPD dalam meningkatkan nilai IDM di Desa Biluhu Barat dan Desa Hulawa

1 Dimensi Pencapaian Tujuan (*Goal attainment*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian tujuan pembangunan di Desa Biluhu Barat belum berlangsung secara optimal. Meskipun berbagai program pembangunan telah

direncanakan melalui RPJMDes dan RKPDes, realisasi di lapangan masih menghadapi sejumlah hambatan yang memengaruhi efektivitas pembangunan desa. Keterlambatan penyelesaian proyek infrastruktur, rendahnya pemanfaatan fasilitas umum, terbatasnya program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, serta lemahnya partisipasi masyarakat menjadi indikator bahwa target pembangunan belum tercapai secara maksimal. Kondisi tersebut diperkuat oleh hasil wawancara yang menunjukkan masih adanya kendala koordinasi antara BPD dan pemerintah desa, keterbatasan akses informasi, serta proses perencanaan yang belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan prioritas masyarakat.

Aspek tata kelola pembangunan juga menunjukkan berbagai kelemahan, terutama pada fungsi koordinasi, pengawasan, serta monitoring dan evaluasi program. Sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan belum berjalan secara konsisten sehingga beberapa program mengalami penundaan, bahkan tidak terlaksana sesuai target yang ditetapkan. Situasi ini berdampak langsung terhadap capaian pembangunan desa yang tercermin pada perkembangan nilai Indeks Desa Membangun (IDM). Setelah mengalami peningkatan terbatas pada tahun 2023, nilai IDM Desa Biluhu Barat menurun menjadi 0,5990 pada tahun 2024 dan mengakibatkan perubahan status desa dari berkembang menjadi tertinggal. Temuan ini menunjukkan bahwa permasalahan pembangunan tidak hanya bersumber pada keterbatasan teknis pelaksanaan program, tetapi juga berkaitan dengan kualitas tata kelola pembangunan desa secara keseluruhan. Efektivitas pembangunan memerlukan perencanaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan partisipasi warga, serta sistem pengawasan yang berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian tujuan pembangunan di Desa Hulawa berlangsung secara efektif dan konsisten. Keberhasilan tersebut ditunjukkan oleh kesesuaian antara perencanaan dan realisasi program pembangunan yang tercantum dalam RPJMDes dan RKPDes. Program pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan kapasitas masyarakat terlaksana sesuai target, tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kondisi ini mencerminkan kemampuan pemerintah desa dan BPD dalam mengelola pembangunan secara terarah, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Efektivitas pembangunan didukung oleh koordinasi yang kuat antara pemerintah desa dan BPD pada setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi program. Musyawarah desa dilaksanakan secara rutin dan partisipatif sehingga menghasilkan kesepahaman dalam penetapan prioritas pembangunan. Fungsi pengawasan BPD juga berjalan optimal melalui monitoring dan evaluasi berkala yang memastikan setiap program tetap sesuai dengan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan. Dukungan masyarakat yang tinggi semakin memperkuat keberhasilan implementasi program karena masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga terlibat aktif dalam proses pembangunan. Keberhasilan tersebut tercermin dalam perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) yang mengalami peningkatan secara konsisten dari 0,7711 pada tahun 2021 menjadi 0,9511 pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa indikator sosial, ekonomi, dan lingkungan berkembang secara berkelanjutan hingga mengantarkan Desa Hulawa mempertahankan status desa mandiri. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa tata kelola pembangunan telah berjalan efektif dengan dukungan kelembagaan yang kuat, koordinasi yang harmonis, serta pengelolaan program yang akuntabel.

2 Dimensi Integrasi (*Integration*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi integrasi dalam pelaksanaan pembangunan desa memperlihatkan perbedaan yang cukup jelas antara Desa Biluhu Barat dan Desa Hulawa.

Integrasi yang dimaksud mencakup kualitas hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa, dan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM). Di Desa Biluhu Barat, hubungan antara BPD dan pemerintah desa telah berjalan melalui forum musyawarah dan rapat koordinasi yang dilaksanakan secara berkala. BPD berupaya menjalankan fungsi representasi dengan menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa. Namun, efektivitas integrasi kelembagaan masih menghadapi berbagai kendala. Komunikasi yang belum merata menyebabkan sebagian aspirasi masyarakat tidak tersampaikan secara optimal. Musyawarah desa juga belum sepenuhnya mencerminkan partisipasi yang inklusif karena kehadiran masyarakat masih didominasi oleh kelompok tertentu. Perbedaan kepentingan dalam penentuan prioritas pembangunan sering muncul dan belum selalu diselesaikan melalui mekanisme konsensus yang kuat. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya kualitas koordinasi antaraktor pembangunan, sehingga proses pengambilan keputusan cenderung membutuhkan waktu lebih lama dan pelaksanaan program belum berjalan secara maksimal.

Hasil telaah dokumen rapat desa dan musyawarah pembangunan memperkuat temuan tersebut. Meskipun musyawarah telah dilaksanakan sesuai prosedur, tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses deliberasi masih terbatas. Integrasi yang terbentuk lebih bersifat administratif daripada substantif, sehingga kolaborasi antaraktor pembangunan belum mampu menghasilkan sinergi yang kuat dalam mendukung peningkatan IDM. Berbeda dengan Desa Biluhu Barat, Desa Hulawa menunjukkan tingkat integrasi yang lebih efektif. Hubungan antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat berlangsung secara harmonis melalui komunikasi terbuka, koordinasi rutin, serta keterlibatan aktif seluruh unsur masyarakat dalam pembangunan desa. Musyawarah desa dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan tokoh masyarakat, kelompok perempuan, pemuda, dan berbagai unsur kelembagaan lainnya. Proses diskusi berlangsung secara terbuka sehingga aspirasi masyarakat dapat diakomodasi secara lebih luas dan keputusan pembangunan dihasilkan melalui musyawarah mufakat.

Dokumentasi kegiatan desa menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan. Transparansi informasi serta koordinasi yang berkelanjutan berhasil membangun kepercayaan dan rasa memiliki terhadap program desa. Integrasi yang kuat tersebut menciptakan kolaborasi yang efektif antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan bersama. Kondisi ini berkontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan program pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta peningkatan nilai IDM hingga Desa Hulawa mencapai status desa mandiri. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh kualitas integrasi kelembagaan, komunikasi kolaboratif, dan partisipasi masyarakat yang berkelanjutan.

3 Dimensi Adaptasi (*Adaptation*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan di Desa Hulawa berlangsung secara adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menerapkan pola pembangunan yang tidak hanya berfokus pada kegiatan rutin, tetapi juga mendorong lahirnya program-program inovatif yang relevan dengan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Perencanaan pembangunan disusun melalui RPJMDes dan RKPDes yang berbasis evaluasi tahunan, sehingga program yang dihasilkan lebih kontekstual dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Peran BPD tidak terbatas pada fungsi pengawasan, melainkan berkembang sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam memberikan masukan, gagasan, serta pertimbangan kebijakan pembangunan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam musyawarah desa dan evaluasi program memperkuat proses pengambilan keputusan yang partisipatif serta meningkatkan akomodasi aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa. Kondisi tersebut didukung oleh komunikasi yang intensif antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat sehingga berbagai kebutuhan dan permasalahan dapat direspons secara cepat dan tepat.

Pembangunan ekonomi desa diarahkan pada pemanfaatan potensi lokal melalui program pemberdayaan masyarakat, penguatan kelompok usaha, dan pelatihan berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Evaluasi program dilakukan secara konsisten sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan penyusunan program berikutnya. Praktik tersebut mencerminkan penerapan pembangunan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Keselarasan antara dokumen perencanaan, implementasi program, dan kebutuhan masyarakat menunjukkan tata kelola pembangunan yang efektif. Kondisi ini berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembangunan desa, penguatan kemandirian masyarakat, serta keberhasilan Desa Hulawa dalam mencapai status desa mandiri dengan capaian Indeks Desa Membangun yang tinggi.

Tabel 2

Ringkasan Temuan Efektivitas Peran BPD

Dimensi	Desa Biluhu Barat	Desa Hulawa
Goal attainment	Tidak tercapai optimal	Tercapai sangat baik
Integration	Lemah	Sangat baik
Adaptation	Rendah	Tinggi

Sumber : Diolah Peneliti, 2026

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) lebih optimal di Desa Hulawa dibandingkan Desa Biluhu Barat. Desa Hulawa berhasil mencapai tujuan pembangunan melalui koordinasi kelembagaan yang kuat, partisipasi masyarakat yang tinggi, serta program pembangunan yang inovatif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, Desa Biluhu Barat masih menghadapi kendala pada aspek pencapaian tujuan, integrasi kelembagaan, dan adaptasi program sehingga berdampak pada rendahnya capaian pembangunan. Kondisi tersebut menegaskan bahwa efektivitas BPD menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan kualitas pembangunan desa dan keberhasilan pencapaian IDM.

3.2. Hasil Faktor yang menyebabkan perbedaan efektivitas peran BPD dalam meningkatkan nilai IDM di Desa Biluhu Barat Kecamatan Biluhu dan Desa Hulawa Kecamatan Telaga

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan telaah dokumentasi, kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendukung pembangunan desa menunjukkan perbedaan antara Desa Biluhu Barat dan Desa Hulawa. Di Desa Biluhu Barat, anggota BPD memiliki pemahaman terhadap tugas dan fungsi kelembagaan serta terlibat dalam musyawarah desa, penyaluran aspirasi masyarakat, dan pengawasan pembangunan. Hubungan kerja antara BPD dan pemerintah desa juga berlangsung cukup baik melalui berbagai forum musyawarah. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa terlihat cukup aktif, terutama dalam penyampaian usulan pembangunan. Namun, capaian pembangunan yang tercermin dari nilai IDM sebesar 0,5990

menunjukkan bahwa keterlibatan tersebut belum mampu menghasilkan dampak yang optimal terhadap peningkatan status pembangunan desa.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan struktur kelembagaan dan pelaksanaan fungsi administratif belum sepenuhnya menjamin efektivitas pembangunan. Peran BPD masih memerlukan penguatan pada aspek kapasitas kelembagaan, kualitas koordinasi, serta kemampuan mendorong implementasi program yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, fungsi representasi dan pengawasan yang telah berjalan perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan pengendalian program pembangunan. Berbeda dengan Desa Biluhu Barat, Desa Hulawa menunjukkan kapasitas kelembagaan yang lebih kuat. Keterlibatan BPD berlangsung secara konsisten dalam proses perencanaan, pembahasan program, pengawasan, dan evaluasi pembangunan desa. Hubungan antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat berjalan melalui mekanisme koordinasi yang terstruktur sehingga menghasilkan tata kelola pembangunan yang lebih efektif. Tingginya partisipasi masyarakat dalam musyawarah maupun pelaksanaan program turut memperkuat kualitas pembangunan yang dilaksanakan.

Hasil observasi dan dokumentasi memperlihatkan bahwa pembangunan Desa Hulawa dilaksanakan secara sistematis, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Program pembangunan dirancang secara terarah dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan desa. Kondisi tersebut berdampak pada peningkatan nilai IDM hingga mencapai 0,9511 dengan status Desa Mandiri. Temuan ini menegaskan bahwa kapasitas kelembagaan BPD yang didukung koordinasi efektif, partisipasi masyarakat yang tinggi, serta tata kelola pembangunan yang kolaboratif menjadi faktor penting dalam mendorong keberhasilan pembangunan desa dan peningkatan Indeks Desa Membangun.

Tabel 3

Temuan Penelitian Faktor-Faktor yang Menyebabkan Perbedaan Efektivitas Peran BPD dalam Meningkatkan Nilai IDM

Faktor	Indikator	Temuan di Desa Biluhu Barat	Temuan di Desa Hulawa	Analisis Perbedaan	Sumber Data
Faktor Internal BPD	Kapasitas dan kompetensi anggota BPD	Anggota BPD aktif dalam pembahasan pembangunan desa	BPD berperan dalam musyawarah dan pemberian pertimbangan pembangunan desa	Hulawa menunjukkan hasil pembangunan yang lebih tinggi	Wawancara
	Pemahaman fungsi BPD	Anggota memahami fungsi aspirasi dan pengawasan	Fungsi BPD dijalankan melalui forum musyawarah desa	Mekanisme pelaksanaan fungsi BPD berbeda	Wawancara
	Manajemen kelembagaan	Koordinasi internal BPD berjalan	Koordinasi kelembagaan dilakukan melalui forum desa	Kedua desa memiliki mekanisme kelembagaan berbeda	Observasi
Faktor	Hubungan	Hubungan	Hubungan kerja	Pola	Wawancara

Hubungan Kelembagaan	BPD dan pemerintah desa	kerja harmonis	berlangsung melalui sistem kelembagaan desa	koordinasi berbeda	
	Komunikasi antar lembaga	Komunikasi dilakukan melalui rapat desa	Komunikasi dilakukan melalui forum kelembagaan desa	Mekanisme komunikasi berbeda	Observasi
	Dukungan pemerintah desa	Pemerintah desa melibatkan BPD dalam pembangunan	Pemerintah desa bekerja sama dengan BPD dalam musyawarah desa	Dukungan kelembagaan terdapat di kedua desa	Wawancara
Faktor Partisipasi Masyarakat	Keterlibatan masyarakat	Masyarakat aktif mengikuti musyawarah desa	Masyarakat terlibat dalam kegiatan pembangunan desa	Partisipasi masyarakat terdapat di kedua desa	Observasi
	Kesadaran pembangunan	Masyarakat menunjukkan kepedulian terhadap pembangunan	Kesadaran masyarakat mendukung pembangunan desa	Hulawa menunjukkan hasil pembangunan lebih tinggi	Wawancara
	Dukungan masyarakat	Masyarakat mendukung kegiatan pembangunan	Masyarakat mendukung program pembangunan desa	Dukungan masyarakat berperan dalam pembangunan	Observasi
Faktor Lingkungan Pembangunan	Kondisi sosial ekonomi	Kondisi sosial ekonomi mempengaruhi pembangunan	Potensi desa dimanfaatkan untuk pembangunan	Hulawa menunjukkan hasil pembangunan lebih optimal	Wawancara
	Sumber daya pembangunan	Sumber daya desa dimanfaatkan untuk pembangunan	Pemanfaatan potensi desa lebih optimal	Hulawa menunjukkan capaian IDM lebih tinggi	Dokumentasi
	Prioritas pembangunan	Program diarahkan pada peningkatan	Program pembangunan mendukung indikator IDM	Hulawa mencapai status desa mandiri	Dokumentasi

	indikator pembangunan

Sumber : Diolah Peneliti, 2026

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, kualitas koordinasi, partisipasi masyarakat, serta kondisi lingkungan pembangunan. Desa Hulawa memperlihatkan tata kelola yang lebih efektif melalui koordinasi kelembagaan yang terstruktur, keterlibatan masyarakat yang tinggi, dan pemanfaatan potensi desa secara optimal. Kondisi tersebut mendorong peningkatan nilai IDM hingga mencapai status desa mandiri. Sebaliknya, Desa Biluhu Barat masih menghadapi keterbatasan pada aspek pengelolaan pembangunan, partisipasi masyarakat, dan optimalisasi sumber daya desa sehingga capaian pembangunan belum maksimal. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan desa memerlukan sinergi antara BPD, pemerintah desa, masyarakat, dan dukungan lingkungan pembangunan yang kondusif.

3.3. Hasil Upaya BPD dalam meningkatkan nilai IDM di Desa Biluhu Barat dan Desa Hulawa

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi penelitian, diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Biluhu Barat telah melakukan berbagai upaya dalam mendukung peningkatan nilai Indeks Desa Membangun (IDM), meskipun hasil yang dicapai belum optimal. BPD secara aktif terlibat dalam musyawarah desa, menyampaikan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan desa. Aspirasi yang disampaikan umumnya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, dan pelayanan publik. BPD juga berupaya mengawal pelaksanaan program agar sesuai dengan rencana pembangunan yang telah disepakati bersama. Berbagai upaya tersebut belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan nilai IDM. Hasil wawancara menunjukkan bahwa salah satu kendala utama adalah koordinasi antara BPD dan pemerintah desa yang belum berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Komunikasi yang dilakukan masih terbatas pada forum rapat atau musyawarah tertentu sehingga sering terjadi ketidaksinkronan antara perencanaan dan pelaksanaan program di lapangan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa juga masih tergolong rendah. Tidak semua masyarakat aktif mengikuti musyawarah maupun terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan, sehingga aspirasi yang diterima BPD belum sepenuhnya mewakili kebutuhan seluruh masyarakat.

Hasil observasi lapangan memperlihatkan bahwa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan masih bersifat rutin dan belum menunjukkan adanya inovasi yang mampu mendorong percepatan pembangunan desa. Program yang dijalankan cenderung mengulang pola yang sama setiap tahun tanpa adanya pengembangan yang signifikan sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat. Kondisi ini diperkuat oleh hasil telaah dokumen RPJMDes, RKPDes, dan laporan realisasi program yang menunjukkan bahwa sebagian program belum terlaksana sesuai target serta belum terintegrasi secara strategis untuk mendukung peningkatan IDM. Data IDM tahun 2021–2024 menunjukkan bahwa perkembangan Desa Biluhu Barat cenderung stagnan bahkan mengalami penurunan pada tahun 2024. Temuan ini mengindikasikan bahwa upaya BPD dalam meningkatkan IDM masih memerlukan penguatan, terutama melalui peningkatan

koordinasi, pengembangan program yang lebih inovatif, optimalisasi partisipasi masyarakat, serta penyusunan strategi pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Tabel 4

Upaya Program Pembangunan Desa Biluhu Barat

No	Kegiatan/Program	Aktor/Pelaksana	Tahun	Realisasi
1	Perbaikan jalan lingkungan	Pemerintah Desa, BPD	2021	Terealisasi sebagian
2	Pembangunan sarana dasar desa	Pemerintah Desa	2022	Terealisasi, namun belum optimal
3	Program pemberdayaan masyarakat	Pemerintah Desa, Lembaga Desa	2022	Terbatas, partisipasi rendah
4	Pelatihan keterampilan masyarakat	Pemerintah Desa	2023	Terealisasi, namun tidak berkelanjutan
5	Kegiatan sosial kemasyarakatan	Pemerintah Desa, Masyarakat	2023	Terealisasi
6	Pembangunan infrastruktur desa	Pemerintah Desa	2024	Sebagian tidak terealisasi
7	Program peningkatan ekonomi desa	Pemerintah Desa, BPD	2024	Belum terealisasi
8	Monitoring dan evaluasi program	Pemerintah Desa, BPD	2024	Dilaksanakan, namun belum optimal

Sumber : Dokumen RPJMDes Tahun 2020-2025, RKPDes Tahun 2024, dan Laporan Realisasi APBDes Tahun 2024 Desa Biluhu Barat

Upaya pembangunan di Desa Biluhu Barat selama periode 2021–2024 telah dilaksanakan melalui program infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun, realisasi program belum optimal akibat rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan inovasi, lemahnya koordinasi, serta pengawasan yang belum efektif, sehingga peningkatan kualitas pembangunan dan capaian IDM masih belum maksimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) di Desa Hulawa berjalan efektif dan memberikan dampak positif terhadap kemajuan desa. BPD berperan aktif pada seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi program. Keterlibatan tersebut terlihat melalui partisipasi BPD dalam penyusunan RPJMDes dan RKPDes, penyampaian aspirasi masyarakat, serta pengawalan pelaksanaan program pembangunan agar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat.

Perencanaan pembangunan dilaksanakan secara partisipatif melalui musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Proses tersebut menghasilkan program pembangunan yang selaras dengan kondisi riil masyarakat serta mendukung pencapaian target pembangunan desa. BPD juga menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten dengan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dan memberikan masukan apabila ditemukan kendala. Evaluasi program dilakukan secara berkala sehingga berbagai permasalahan dapat segera ditindaklanjuti melalui solusi yang disepakati bersama. Hasil observasi lapangan memperlihatkan bahwa pelaksanaan program pembangunan berlangsung sesuai target yang telah ditetapkan. Kegiatan pembangunan menunjukkan kesinambungan antarsektor, mencakup pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi desa, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Program yang dijalankan tidak hanya bersifat rutin, tetapi juga menunjukkan adanya inovasi dan penyesuaian terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting yang mendukung keberhasilan pembangunan desa. Masyarakat terlibat aktif dalam musyawarah, pelaksanaan kegiatan, serta pengawasan pembangunan sehingga tercipta rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. Kondisi tersebut memperkuat sinergi antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dalam mewujudkan tujuan pembangunan desa. Hasil telaah dokumen RPJMDes, RKPDes, laporan pelaksanaan program, serta data IDM menunjukkan bahwa seluruh program pembangunan terlaksana dengan tingkat kesesuaian yang tinggi terhadap perencanaan. Evaluasi program dimanfaatkan sebagai dasar penyempurnaan kegiatan pada periode berikutnya. Keberhasilan tersebut tercermin dari peningkatan nilai IDM Desa Hulawa selama periode 2021–2024 hingga mencapai status desa mandiri. Pencapaian ini menunjukkan bahwa efektivitas peran BPD, dukungan pemerintah desa, serta partisipasi masyarakat mampu mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 5

Upaya Program Pembangunan Desa Hulawa

No	Kegiatan/Program	Aktor/Pelaksana	Tahun	Realisasi
1	Pembangunan dan perbaikan infrastruktur	Pemerintah Desa, BPD, Masyarakat	2021	Terealisasi sesuai target
2	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat	Pemerintah Desa, BPD	2022	Terealisasi dan berkelanjutan
3	Pelatihan dan pengembangan kapasitas warga	Pemerintah Desa, Lembaga Desa	2022	Terealisasi dengan partisipasi tinggi
4	Musyawarah desa partisipatif	BPD, Pemerintah Desa, Masyarakat	2023	Terealisasi secara rutin dan inklusif
5	Program inovasi berbasis kebutuhan lokal	Pemerintah Desa, BPD	2023	Terealisasi dan berkembang
6	Kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Pemerintah Desa, Masyarakat	2023	Terealisasi aktif
7	Monitoring dan evaluasi program	BPD, Pemerintah Desa	2024	Dilaksanakan secara berkala dan efektif
8	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Pemerintah Desa	2024	Terealisasi dengan baik
9	Penguatan partisipasi masyarakat	BPD, Pemerintah Desa	2024	Terealisasi dengan keterlibatan tinggi

Sumber : Dokumen RPJMDes Tahun 2020-2025, RKPDes Tahun 2024, dan Laporan Realisasi APBDes Tahun 2024 Desa Hulawa

Upaya pembangunan di Desa Hulawa selama periode 2021–2024 menunjukkan kinerja yang efektif dan berkelanjutan. Realisasi program berjalan sesuai perencanaan, didukung sinergi antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Tingginya partisipasi masyarakat, inovasi program, serta pengawasan yang optimal berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembangunan dan keberhasilan pencapaian status desa mandiri melalui peningkatan IDM.

Tabel 6

Upaya BPD dalam Meningkatkan IDM

Aspek	Desa Biluhu Barat	Desa Hulawa
Perencanaan	Kurang optimal	Berbasis kebutuhan
Pengawasan	Belum maksimal	Efektif
Partisipasi Masyarakat	Rendah	Tinggi

Inovasi Program	Minim	Tinggi
Dampak terhadap IDM	Menurun	Meningkat

Sumber : Diolah Peneliti, 2026

Perbandingan kedua desa menunjukkan bahwa efektivitas upaya BPD sangat memengaruhi peningkatan nilai IDM. Desa Hulawa memiliki perencanaan yang matang, pengawasan efektif, partisipasi masyarakat tinggi, serta program yang inovatif sehingga berhasil mencapai status desa mandiri. Sebaliknya, Desa Biluhu Barat masih menghadapi kelemahan pada aspek tersebut sehingga nilai IDM mengalami stagnasi bahkan penurunan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian Efektivitas peran BPD dalam meningkatkan nilai IDM di Desa Biluhu Barat dan Desa Hulawa

Berdasarkan hasil penelitian komparatif antara Desa Biluhu Barat Kecamatan Biluhu dan Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontal, maka dapat disimpukan kesesuaian dengan indikator dan ditemukan perbedaan yang cukup signifikan terkait efektivitas peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan nilai Indeks Desa Membangun (IDM). Perbedaan tersebut terlihat dari kesesuaian program kerja BPD, kualitas koordinasi dengan pemerintah desa, tingkat partisipasi masyarakat, hingga kemampuan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan pembangunan dan kebijakan pemerintah. Di Desa Biluhu Barat, program kerja BPD belum sepenuhnya selaras dengan RPJMDes dan prioritas peningkatan IDM. Beberapa program pembangunan, terutama pada sektor pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi desa, belum terlaksana secara optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh lemahnya fungsi pengawasan, koordinasi yang belum efektif, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah desa. Akibatnya, berbagai program pembangunan belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara maksimal dan berdampak pada stagnasi bahkan penurunan nilai IDM desa. Koordinasi antara BPD dan pemerintah desa di Desa Biluhu Barat masih menghadapi berbagai kendala. Komunikasi yang kurang intensif, perbedaan kepentingan dalam forum musyawarah, serta rendahnya keterlibatan masyarakat menyebabkan proses pengambilan keputusan pembangunan berjalan kurang efektif. Hubungan sosial antar lembaga desa juga belum sepenuhnya harmonis sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan program pembangunan. BPD juga dinilai kurang responsif dalam mengakomodasi perubahan kebutuhan masyarakat dan belum mampu menyesuaikan program kerja secara fleksibel terhadap perkembangan kebijakan pembangunan desa.

Desa Hulawa menunjukkan efektivitas peran BPD yang jauh lebih baik. Program kerja BPD telah disusun sesuai RPJMDes dan diarahkan pada prioritas peningkatan IDM melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan partisipasi masyarakat. Fungsi pengawasan dan musyawarah pembangunan berjalan secara optimal sehingga program-program desa dapat direalisasikan sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Koordinasi dan sinergi antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat di Desa Hulawa berlangsung secara harmonis melalui komunikasi yang terbuka, transparan, dan partisipatif. Masyarakat dilibatkan dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Selain itu, BPD dan pemerintah desa memiliki kemampuan adaptasi yang baik terhadap perubahan sosial maupun kebijakan pembangunan sehingga mampu menghasilkan berbagai inovasi yang mendukung peningkatan kualitas pembangunan desa.

Berdasarkan data dapat dijelaskan bahwa efektivitas peran BPD dalam meningkatkan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antara

Desa Biluhu Barat dan Desa Hulawa pada setiap dimensi yang dianalisis. Pada dimensi *goal attainment*, Desa Biluhu Barat belum mampu mencapai tujuan pembangunan secara optimal yang ditandai dengan masih adanya program yang tidak terealisasi sesuai target, sedangkan Desa Hulawa menunjukkan pencapaian yang sangat baik dengan realisasi program yang sesuai perencanaan. Pada dimensi *integration*, Desa Biluhu Barat masih menghadapi kelemahan dalam hal komunikasi dan koordinasi antar aktor pembangunan desa, sementara Desa Hulawa telah menunjukkan hubungan yang harmonis antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat. Selanjutnya, pada dimensi *adaptation*, Desa Biluhu Barat tergolong rendah dalam merespons perubahan kebutuhan masyarakat yang ditandai dengan kurangnya inovasi program, sedangkan Desa Hulawa memiliki tingkat adaptasi yang tinggi melalui pengembangan program yang inovatif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas peran BPD di Desa Hulawa lebih optimal dibandingkan Desa Biluhu Barat dalam mendukung peningkatan nilai IDM.

Temuan penelitian ini juga memiliki kesesuaian dengan beberapa penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Hasanudin (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan peran BPD sangat ditentukan oleh kemampuan dalam membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan pemerintah desa dan masyarakat. Hal ini selaras dengan temuan di Desa Hulawa yang menunjukkan tingkat integrasi yang tinggi. Sementara itu, penelitian Chasanah dan Riyadh (2024) serta Udayana et al. (2023) mengungkapkan bahwa perbedaan efektivitas kelembagaan desa sering kali dipengaruhi oleh dinamika internal, seperti konflik kepentingan dan kapasitas kelembagaan, yang juga ditemukan pada kasus Desa Biluhu Barat. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya menguatkan temuan sebelumnya, tetapi juga memberikan gambaran empiris yang lebih kontekstual terkait variasi efektivitas BPD di tingkat desa.

Temuan ini juga sesuai dengan teori contingency yang dikemukakan oleh Lawrence dan Lorsch (1967), yang menyatakan bahwa efektivitas organisasi sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara struktur organisasi dengan kondisi lingkungan. Dalam konteks ini, Desa Hulawa mampu menyesuaikan program dan tata kelola dengan kebutuhan masyarakat, sehingga menghasilkan tingkat adaptasi yang tinggi. Sementara itu, Desa Biluhu Barat menunjukkan ketidaksesuaian antara perencanaan dan kondisi riil, yang berdampak pada rendahnya efektivitas. Teori collaborative governance dari Chris Ansell dan Alison Gash (2008) juga mendukung temuan ini. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan kebijakan publik sangat ditentukan oleh kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan aktor lainnya. Desa Hulawa menunjukkan praktik kolaborasi yang kuat melalui koordinasi yang intens dan partisipasi masyarakat yang tinggi, sedangkan Desa Biluhu Barat masih lemah dalam membangun kolaborasi, sehingga berdampak pada rendahnya integrasi.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian Faktor yang menyebabkan perbedaan efektivitas peran BPD dalam meningkatkan nilai IDM di Desa Biluhu Barat Kecamatan Biluhu dan Desa Hulawa Kecamatan Telaga

Dalam konteks penelitian ini, perbedaan nilai IDM antara Desa Biluhu Barat dan Desa Hulawa mencerminkan perbedaan dalam dinamika tata kelola pembangunan desa. Desa Hulawa menunjukkan pola pembangunan yang lebih terintegrasi antara lembaga desa, masyarakat, serta pemanfaatan potensi lokal, sehingga proses pembangunan desa mampu berjalan secara lebih efektif. Efektivitas peran BPD dalam pembangunan desa pada dasarnya merupakan bagian dari sistem tata kelola pemerintahan desa yang lebih luas. Ketika hubungan kelembagaan berjalan

secara sinergis dan partisipasi masyarakat dapat diakomodasi secara baik, maka peran BPD dapat memberikan kontribusi yang lebih nyata terhadap peningkatan kualitas pembangunan desa.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pencapaian tujuan organisasi pada Desa Hulawa berlangsung lebih efektif dibandingkan Desa Biluhu Barat. Menurut Duncan dalam Steers (1985), efektivitas organisasi dapat diukur dari kemampuan organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Suhada et al., 2022). Dalam konteks penelitian ini, tujuan yang dimaksud adalah keberhasilan pembangunan desa yang tercermin melalui peningkatan nilai Indeks Desa Membangun (IDM). Keberhasilan Desa Hulawa mempertahankan status desa mandiri dengan nilai IDM yang terus meningkat menunjukkan bahwa fungsi BPD tidak hanya dilaksanakan secara administratif, tetapi juga mampu menghasilkan output dan outcome pembangunan yang sesuai dengan tujuan organisasi desa (Liu et al., 2022; Xu et al., 2023).

Sebaliknya, kondisi Desa Biluhu Barat menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi BPD belum sepenuhnya mampu mendorong tercapainya sasaran pembangunan desa. Meskipun BPD telah melaksanakan fungsi musyawarah, penyaluran aspirasi, dan pengawasan pembangunan, hasil yang dicapai belum mampu meningkatkan status desa. Penurunan nilai IDM menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pembangunan yang direncanakan dengan hasil pembangunan yang diperoleh. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas organisasi pada dimensi pencapaian tujuan masih belum optimal karena kemampuan organisasi dalam mengarahkan sumber daya menuju target pembangunan belum berjalan secara maksimal (Bai et al., 2024; Robert et al., 2021).

Berdasarkan perspektif Duncan dalam Steers (1985), integrasi menunjukkan kemampuan organisasi membangun hubungan yang harmonis, koordinatif, dan kolaboratif dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pencapaian tujuan organisasi (Azaria et al., 2025; Zaenul Muttaqin et al., 2026). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat integrasi kelembagaan di Desa Hulawa lebih kuat dibandingkan Desa Biluhu Barat. Hubungan kerja yang harmonis antara BPD, pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat menciptakan proses pembangunan yang lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tingginya integrasi kelembagaan tersebut tercermin melalui intensitas komunikasi, koordinasi program pembangunan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui forum musyawarah desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa BPD berhasil menjalankan fungsi representatifnya sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa. Integrasi yang kuat menghasilkan kesamaan persepsi mengenai arah pembangunan sehingga potensi konflik kepentingan dapat diminimalkan. Sebaliknya, integrasi kelembagaan di Desa Biluhu Barat belum berjalan secara optimal. Temuan penelitian menunjukkan masih terdapat keterbatasan koordinasi antara BPD dan pemerintah desa yang berdampak pada belum maksimalnya penyaluran aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan pembangunan. Berdasarkan teori efektivitas organisasi, lemahnya integrasi akan menghambat pencapaian tujuan organisasi karena koordinasi antaraktor pembangunan tidak berjalan secara efektif. Oleh karena itu, kualitas integrasi kelembagaan menjadi faktor penting yang menjelaskan perbedaan efektivitas peran BPD pada kedua desa.

Menurut Duncan dalam Steers (1985), adaptasi merupakan kemampuan organisasi menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan, kebutuhan masyarakat, serta tuntutan pembangunan yang terus berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Hulawa memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik dibandingkan Desa Biluhu Barat. Kemampuan tersebut terlihat dari responsivitas BPD dan pemerintah desa dalam mengidentifikasi kebutuhan

masyarakat, mengembangkan program pembangunan berbasis potensi lokal, serta menyesuaikan kebijakan pembangunan dengan prioritas yang mendukung peningkatan indikator IDM.

Kemampuan adaptasi yang baik memungkinkan Desa Hulawa menghasilkan program pembangunan yang lebih inovatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa BPD tidak hanya menjalankan fungsi kelembagaan secara formal, tetapi juga mampu berperan sebagai agen perubahan yang mendorong pembaruan dalam pembangunan desa. Dalam perspektif efektivitas organisasi, organisasi yang mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan memiliki peluang lebih besar untuk mencapai tujuan dan mempertahankan keberlanjutan pembangunan. Sebaliknya, adaptasi di Desa Biluhu Barat masih menghadapi berbagai kendala. Program pembangunan yang relatif rutin dan kurang inovatif menunjukkan bahwa kemampuan organisasi dalam merespons perubahan kebutuhan masyarakat belum berjalan secara optimal. Akibatnya, pembangunan desa belum mampu menghasilkan peningkatan indikator pembangunan yang signifikan. Temuan ini memperkuat pandangan Duncan bahwa rendahnya kemampuan adaptasi akan berdampak pada menurunnya efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Temuan penelitian ini juga memperlihatkan kesesuaian dengan beberapa penelitian sebelumnya yang membahas faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peran BPD dalam pembangunan desa. Penelitian Ardiansyah dan Rodiyah (2024) juga menemukan bahwa efektivitas kelembagaan desa dalam pembangunan sering kali dipengaruhi oleh kualitas aparatur desa, keterlambatan pelaksanaan program pembangunan, serta tingkat kemandirian desa (Ardiansyah & Rodiyah, 2024). Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa kondisi lingkungan pembangunan desa dan pemanfaatan potensi lokal turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan desa. Penelitian Yuliana dan Agustina (2025) juga menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan desa yang diukur melalui indikator Indeks Desa Membangun dipengaruhi oleh validitas data pembangunan serta tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Hal ini memperkuat temuan penelitian ini yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat serta kualitas perencanaan pembangunan desa menjadi faktor penting dalam peningkatan nilai IDM.

Temuan penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting bagi penguatan tata kelola pembangunan desa. Peningkatan kapasitas kelembagaan BPD menjadi aspek yang perlu diperhatikan agar lembaga tersebut mampu menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, serta penyaluran aspirasi masyarakat secara lebih optimal. Peningkatan kapasitas tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan kelembagaan, penguatan pemahaman regulasi desa, serta peningkatan kemampuan perencanaan pembangunan desa. Hubungan kelembagaan antara BPD dan pemerintah desa perlu terus diperkuat melalui mekanisme koordinasi yang lebih sistematis dan transparan. Sinergi antara kedua lembaga tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa proses pembangunan desa dapat berjalan secara terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hubungan antara efektivitas peran BPD dan peningkatan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) dalam penelitian ini terlihat melalui kontribusi BPD terhadap tiga dimensi utama penyusun IDM, yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan. Efektivitas BPD tidak hanya tercermin dari pelaksanaan fungsi kelembagaan secara administratif, tetapi juga dari kemampuannya mendorong proses pembangunan yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat desa. Semakin efektif BPD menjalankan fungsi pengawasan, penyaluran aspirasi, dan pembentukan kesepakatan

pembangunan desa, semakin besar peluang tercapainya indikator-indikator pembangunan yang menjadi komponen penilaian IDM.

Pada dimensi ketahanan sosial, efektivitas BPD berkontribusi melalui penguatan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, pengawalan program pelayanan dasar, serta penyaluran aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan pembangunan desa. Keterlibatan aktif masyarakat yang difasilitasi oleh BPD mendorong peningkatan akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, keamanan, dan kehidupan sosial masyarakat. Kondisi tersebut terlihat lebih kuat di Desa Hulawa, di mana BPD secara aktif menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa sehingga berbagai kebutuhan sosial masyarakat dapat diakomodasi dalam program pembangunan desa. Sebaliknya, efektivitas yang belum optimal di Desa Biluhu Barat menyebabkan sebagian kebutuhan masyarakat belum sepenuhnya terintegrasi dalam prioritas pembangunan desa.

Pada dimensi ketahanan ekonomi, BPD berperan dalam mengawasi penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan ekonomi desa, memastikan penggunaan anggaran desa berjalan sesuai kebutuhan masyarakat, serta mendorong pemanfaatan potensi ekonomi lokal. Melalui fungsi pengawasan dan pemberian masukan terhadap kebijakan pembangunan, BPD dapat membantu pemerintah desa mengarahkan program pada kegiatan yang mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, memperkuat usaha ekonomi desa, dan memperluas peluang pendapatan masyarakat. Desa Hulawa menunjukkan bahwa koordinasi yang baik antara BPD dan pemerintah desa menghasilkan program pembangunan yang lebih responsif terhadap potensi ekonomi lokal sehingga berkontribusi pada peningkatan indikator ketahanan ekonomi dalam IDM.

Pada dimensi ketahanan lingkungan, efektivitas BPD tercermin melalui keterlibatannya dalam pengawasan pembangunan fisik desa, pemanfaatan sumber daya alam, serta pengendalian program pembangunan agar tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. BPD berperan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan pemanfaatan potensi desa dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keberlanjutan pembangunan desa. Kemampuan BPD dalam mengawasi dan mengawal kebijakan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan desa sebagai bagian dari indikator IDM. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas BPD memiliki hubungan yang bersifat multidimensional terhadap peningkatan nilai IDM. Peran BPD yang efektif tidak hanya memperkuat tata kelola pemerintahan desa, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan ketahanan sosial, penguatan ketahanan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan desa. Oleh karena itu, semakin tinggi efektivitas BPD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat, semakin besar kontribusinya terhadap peningkatan nilai IDM dan pencapaian status desa yang lebih maju dan mandiri.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa perlu terus didorong melalui forum musyawarah desa serta kegiatan pembangunan berbasis masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa akan meningkatkan rasa memiliki terhadap program pembangunan desa sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Pemerintah desa perlu memanfaatkan potensi lokal serta sumber daya desa secara lebih optimal agar pembangunan desa juga pada penguatan aspek sosial dan ekonomi masyarakat desa. Peningkatan efektivitas peran BPD dalam pembangunan desa tidak dapat dipisahkan dari penguatan tata kelola pemerintahan desa secara keseluruhan. Ketika lembaga desa, masyarakat, serta potensi lokal dapat bersinergi secara baik, maka pembangunan

desa dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan, serta mampu meningkatkan status kemandirian desa sebagaimana tercermin dalam nilai Indeks Desa Membangun.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian Upaya BPD dalam meningkatkan nilai IDM di Desa Biluhu Barat dan Desa Hulawa

Berdasarkan temuan empiris yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, terlihat bahwa upaya BPD dalam meningkatkan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) di Desa Biluhu Barat dan Desa Hulawa menunjukkan perbedaan yang cukup tajam. Di Desa Biluhu Barat, upaya yang dilakukan BPD sebenarnya telah berjalan dalam bentuk keterlibatan pada musyawarah desa, penyaluran aspirasi masyarakat, serta pengawasan program. Namun demikian, upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini tercermin dari perencanaan program yang masih bersifat umum, pelaksanaan yang kurang terkontrol secara menyeluruh, serta minimnya inovasi dalam pembangunan desa. Kondisi tersebut diperkuat oleh rendahnya partisipasi masyarakat dan lemahnya koordinasi antar aktor desa, sehingga berdampak pada menurunnya nilai IDM. Sebaliknya, di Desa Hulawa, upaya BPD tampak lebih terarah dan konsisten. BPD tidak hanya hadir dalam proses formal, tetapi juga aktif membangun komunikasi, memperkuat koordinasi, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Program yang dirancang cenderung berbasis kebutuhan masyarakat dan diikuti dengan pengawasan serta evaluasi yang berkelanjutan. Situasi ini berkontribusi pada peningkatan nilai IDM hingga mencapai status desa mandiri.

Jika dikaitkan dengan teori efektivitas organisasi menurut Duncan dalam Steers (1985), temuan ini memperlihatkan hubungan yang cukup jelas antara kualitas upaya yang dilakukan dengan capaian pembangunan desa (Shintawati et al., 2023; Suhendro, 2021). Pada Desa Hulawa, upaya BPD yang kuat dalam aspek perencanaan, pengawasan, partisipasi, dan inovasi mencerminkan terpenuhinya ketiga indikator efektivitas, yaitu *goal attainment*, *integration*, dan *adaptation*. Pencapaian tujuan terlihat dari keberhasilan realisasi program yang berdampak langsung pada peningkatan IDM. Integrasi tercermin dari hubungan yang harmonis antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat, yang memungkinkan terbangunnya konsensus dalam setiap kebijakan. Sementara itu, adaptasi tampak dari kemampuan desa dalam menghadirkan program yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebaliknya, pada Desa Biluhu Barat, upaya yang dilakukan belum mampu mengintegrasikan ketiga indikator tersebut secara utuh. Perencanaan yang belum berbasis kebutuhan menunjukkan lemahnya orientasi pada pencapaian tujuan (*goal attainment*). Koordinasi yang kurang efektif dan rendahnya partisipasi masyarakat mengindikasikan lemahnya integrasi (*integration*). Sementara itu, minimnya inovasi program mencerminkan rendahnya kemampuan adaptasi (*adaptation*). Ketidakseimbangan pada ketiga aspek ini menyebabkan upaya BPD belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan IDM. Secara lebih mendalam, temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan aktivitas atau keterlibatan formal BPD, tetapi lebih pada kualitas dan konsistensi upaya yang dilakukan dalam mengelola proses pembangunan desa. Upaya yang bersifat prosedural tanpa diiringi dengan penguatan komunikasi, inovasi, dan partisipasi cenderung tidak mampu menghasilkan perubahan yang berarti. Sebaliknya, upaya yang terintegrasi dan adaptif mampu menciptakan dampak yang lebih nyata terhadap peningkatan kualitas pembangunan desa.

Temuan penelitian ini juga memiliki kesesuaian dengan beberapa penelitian terdahulu. Hasil penelitian Wahyuni et al. (2020) yang menunjukkan bahwa peningkatan IDM dipengaruhi

oleh pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat dan pemberdayaan ekonomi, sejalan dengan kondisi di Desa Hulawa yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam setiap program . Sementara itu, penelitian Astika dan SSubawa (2021) yang menemukan bahwa keterbatasan tata kelola dan sumber daya berdampak pada tidak tercapainya tujuan pembangunan, relevan dengan kondisi di Desa Biluhu Barat yang masih menghadapi kendala dalam koordinasi dan pelaksanaan program. Selain itu, penelitian Tajuddin et al. (2025) yang menekankan pentingnya pemanfaatan data IDM dalam perencanaan pembangunan juga memperkuat temuan bahwa desa yang mampu mengintegrasikan data dan kebutuhan masyarakat dalam perencanaan akan lebih berhasil dalam meningkatkan status IDM.

Berdasarkan sintesis temuan, dapat dipahami bahwa upaya BPD dalam meningkatkan IDM bukan hanya persoalan menjalankan fungsi formal, tetapi lebih pada kemampuan membangun proses yang hidup di dalam masyarakat desa. BPD yang efektif adalah BPD yang mampu menjembatani aspirasi masyarakat, mengawal kebijakan secara konsisten, serta mendorong lahirnya inovasi yang relevan dengan kebutuhan lokal. Dengan kata lain, makna utama dari temuan ini adalah bahwa kualitas interaksi sosial dan kapasitas adaptif kelembagaan menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pembangunan desa.

Implikasi teoretis dari penelitian ini menunjukkan bahwa teori efektivitas organisasi dari Duncan dalam Steers (1985) tetap relevan digunakan dalam konteks pemerintahan desa, namun perlu dipahami secara lebih kontekstual. Dalam praktik di tingkat desa, dimensi integrasi dan adaptasi tampak memiliki peran yang lebih dominan dalam mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan. Oleh karena itu, arah pengembangan model efektivitas BPD ke depan perlu menekankan pada penguatan aspek kolaborasi, partisipasi masyarakat, serta inovasi kelembagaan. Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dengan memperlihatkan bahwa efektivitas BPD tidak hanya diukur dari capaian program, tetapi juga dari kemampuan membangun relasi sosial yang kuat dan responsif terhadap perubahan. Dengan demikian, pendekatan efektivitas yang lebih holistik menjadi penting dalam memahami dinamika pembangunan desa secara lebih utuh.

3.7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perbedaan Efektivitas Peran BPD dalam Meningkatkan IDM

Perbedaan capaian Indeks Desa Membangun (IDM) antara Desa Biluhu Barat dan Desa Hulawa menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tetapi lebih ditentukan oleh tingkat efektivitas kelembagaan dalam menjalankan fungsi representasi, pengawasan, dan pengambilan keputusan pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas peran BPD berkaitan erat dengan kualitas kepemimpinan desa, tingkat partisipasi masyarakat, kapasitas kelembagaan, tata kelola pemerintahan, serta dukungan berbagai aktor pembangunan yang terlibat dalam proses pembangunan desa.

Kepemimpinan desa menjadi faktor yang paling menentukan dalam membangun hubungan kerja antara pemerintah desa dan BPD. Desa Hulawa memperlihatkan pola kepemimpinan yang mendorong kolaborasi, komunikasi terbuka, dan pembagian peran yang jelas antara pemerintah desa dan BPD. Kondisi tersebut menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan dapat berlangsung secara sinergis. Sebaliknya, hubungan kerja yang belum sepenuhnya harmonis di Desa Biluhu Barat menyebabkan fungsi koordinasi belum berjalan secara optimal. Dampaknya

terlihat pada masih terbatasnya integrasi aspirasi masyarakat ke dalam program pembangunan serta rendahnya efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan desa.

Partisipasi masyarakat juga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan pembangunan desa. Tingkat keterlibatan masyarakat yang tinggi di Desa Hulawa menghasilkan proses pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga. Kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa tidak hanya berfungsi sebagai formalitas administratif, tetapi menjadi sarana penyampaian aspirasi dan pengambilan keputusan bersama. Situasi tersebut memperkuat legitimasi kebijakan pembangunan sekaligus meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap program yang dijalankan. Kondisi berbeda terlihat di Desa Biluhu Barat, di mana partisipasi masyarakat masih relatif terbatas sehingga pembangunan cenderung didominasi oleh aktor-aktor tertentu dan kurang mencerminkan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Aspek kapasitas kelembagaan BPD turut memengaruhi perbedaan efektivitas pembangunan desa. BPD Desa Hulawa menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam memahami tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai lembaga representatif masyarakat. Pemahaman tersebut tercermin melalui keterlibatan aktif dalam proses perencanaan, pengawasan, serta evaluasi pembangunan desa. Kapasitas kelembagaan yang baik memungkinkan BPD menjalankan fungsi kontrol secara efektif sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Sebaliknya, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di Desa Biluhu Barat menyebabkan pelaksanaan fungsi BPD belum sepenuhnya optimal, terutama dalam mengawal kebijakan pembangunan dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara komprehensif.

Perbedaan efektivitas juga dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan desa. Desa Hulawa menunjukkan praktik tata kelola yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel. Keterbukaan informasi pembangunan, pengelolaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan, serta mekanisme pengawasan yang berjalan baik mendorong meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan BPD. Tingkat kepercayaan tersebut menjadi modal sosial yang penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan. Sebaliknya, tata kelola pemerintahan yang belum optimal di Desa Biluhu Barat berdampak pada rendahnya efektivitas koordinasi, terbatasnya pengawasan, dan belum maksimalnya dukungan masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah dukungan kelembagaan dan kemampuan memanfaatkan potensi lokal. Desa Hulawa berhasil membangun sinergi antara pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, kelompok masyarakat, dan berbagai unsur pembangunan lainnya. Sinergi tersebut memperkuat kapasitas desa dalam merumuskan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekaligus memanfaatkan potensi lokal sebagai sumber daya pembangunan. Kondisi tersebut berbeda dengan Desa Biluhu Barat yang masih menghadapi keterbatasan dalam membangun kolaborasi antar lembaga dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki sebagai modal pembangunan desa.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa capaian IDM yang lebih tinggi di Desa Hulawa merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang saling mendukung, bukan semata-mata akibat pelaksanaan fungsi BPD secara formal. Efektivitas BPD berkembang ketika didukung oleh kepemimpinan yang kolaboratif, partisipasi masyarakat yang kuat, kapasitas kelembagaan yang memadai, tata kelola pemerintahan yang baik, serta dukungan kelembagaan yang terintegrasi. Sebaliknya, kelemahan pada salah satu faktor tersebut dapat mengurangi efektivitas BPD dalam menjalankan perannya dan berdampak pada rendahnya capaian pembangunan desa. Temuan ini memperlihatkan bahwa peningkatan nilai IDM memerlukan penguatan kelembagaan desa secara

menyeluruh, sehingga BPD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga formal pemerintahan desa, tetapi juga sebagai aktor strategis yang mampu mendorong pembangunan desa secara partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) menunjukkan perbedaan antara Desa Biluhu Barat Kecamatan Biluhu dan Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo. Ditinjau dari dimensi pencapaian tujuan (*goal attainment*), integrasi (*integration*), dan adaptasi (*adaptation*), BPD Desa Hulawa menunjukkan tingkat efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan BPD Desa Biluhu Barat. Pada Desa Biluhu Barat, peran BPD dalam fungsi musyawarah, penyaluran aspirasi, dan pengawasan pembangunan telah dilaksanakan, namun belum berjalan secara optimal sehingga belum mampu mendorong peningkatan capaian IDM secara signifikan. Sebaliknya, BPD Desa Hulawa mampu menjalankan fungsi-fungsinya secara lebih efektif melalui koordinasi kelembagaan yang baik, partisipasi masyarakat yang tinggi, serta kemampuan beradaptasi terhadap kebutuhan pembangunan desa, yang berkontribusi terhadap pencapaian status desa mandiri. Perbedaan efektivitas peran BPD pada kedua desa dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan BPD, kualitas hubungan antara BPD dan pemerintah desa, tingkat partisipasi masyarakat, serta kemampuan desa dalam mengelola sumber daya dan potensi pembangunan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas peran BPD merupakan salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap keberhasilan pembangunan desa dan peningkatan nilai Indeks Desa Membangun (IDM).

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini hanya dilakukan pada dua desa, yaitu Desa Biluhu Barat Kecamatan Biluhu dan Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk menggambarkan efektivitas peran BPD di seluruh desa dengan karakteristik yang berbeda. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang sangat bergantung pada data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga interpretasi temuan masih dipengaruhi oleh subjektivitas informan dan peneliti. Penelitian ini juga belum menganalisis secara mendalam faktor-faktor eksternal, seperti kebijakan pemerintah daerah, dukungan anggaran, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, yang berpotensi memengaruhi efektivitas peran BPD dalam meningkatkan nilai Indeks Desa Membangun (IDM).

Arah Masa Depan Penelitian (future work): Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan studi dengan melibatkan lebih banyak desa yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang berbeda sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan nilai Indeks Desa Membangun (IDM). Selain itu, penelitian mendatang dapat menggunakan pendekatan mixed methods dengan mengombinasikan data kualitatif dan kuantitatif untuk mengukur secara lebih objektif hubungan antara efektivitas kinerja BPD dan capaian indikator IDM. Penelitian berikutnya juga perlu mengkaji pengaruh faktor-faktor eksternal, seperti kebijakan pemerintah daerah, kapasitas aparatur desa, dukungan anggaran, pemanfaatan teknologi informasi, dan tingkat pemberdayaan masyarakat, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang menentukan keberhasilan BPD dalam mendukung pembangunan desa dan percepatan peningkatan status desa.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Pemerintah Desa Biluhu Barat Kecamatan Biluhu dan Pemerintah Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang telah memberikan izin, informasi, dan data yang diperlukan selama proses penelitian. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para informan, masyarakat desa, dosen pembimbing, serta seluruh pihak yang telah memberikan masukan, arahan, dan dukungan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi bahan masukan dalam upaya peningkatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Adiwijaya, S., Harefa, A. T., Isnaini, S., Raehana, S., Mardikawati, B., Laksono, R. D., Saktisyahputra, S., Purnamasari, R., Ningrum, W. S., & Mayasari, M. (2024). *Buku ajar metode penelitian kualitatif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Ali, Z., Wasistiono, S., Lambelanova, R., & Ilham, M. (2026). The implementation of delegated authority through an integrated district service system (patent). *ARISTO*, *14*(1), 630–668. https://doi.org/10.24269/ars.v14i1.12543

Anto, R. P., Nur, N., Yusriani, Y., Ardah, F. K., Ayu, J. D., Nurmahdi, A., Apriyeni, B. A. R., Purwanti, P., Adrianingsih, N. Y., & Putra, M. F. P. (2024). Metode penelitian kualitatif: Teori dan penerapannya. *Penerbit Tahta Media*.

Ardiansyah, M., & Rodiyah, I. (2024). Mengevaluasi efektivitas badan permusyawaratan desa dalam pengembangan desa di indonesia. *Journal Pemberdayaan Ekonomi Dan Masyarakat Vol*, *1*(1), 1–10. https://doi.org/10.47134/jpem.v1i1.320

Aspinall, E., Berenschot, W., Savirani, A., & Ruhyanto, A. (2025). Analysing and explaining variation in village governance regimes across Indonesia. *South East Asia Research*, *33*(1), 12–31. https://doi.org/10.1080/0967828X.2025.2483168

Azaria, A. A., Lambelanova, R., Sholihah, I. F., & Utami, E. S. B. (2025). Evaluation of waste management policy in semarang city, central java province, indonesia. *International Journal of Kybernology*, 18–29. https://doi.org/10.33701/ijok.v6i1.5639

Bai, C., Guan, W., Wang, D., & Chen, X. (2024). Digital village construction and the quality of life of rural residents. *International Review of Economics & Finance*, *96*, 103729. https://doi.org/10.1016/j.iref.2024.103729

Bella, R., Hanafiah, S., & Taryanto, T. (2024). Efektivitas pengawasan badan permusyawaratan desa terhadap pemerintah desa dalam pembangunan desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014. *Innovative: Journal of Social Science Research*, *4*(6), 2626–2635. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.16666

Bi, G., & Yang, Q. (2023). The spatial production of rural settlements as rural homestays in the context of rural revitalization: Evidence from a rural tourism experiment in a Chinese village. *Land Use Policy*, *128*, 106600. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.106600

Castañeda-Barba, S., Top, E. M., & Stalder, T. (2024). Plasmids, a molecular cornerstone of antimicrobial resistance in the One Health era. *Nature Reviews Microbiology*, *22*(1), 18–32. https://doi.org/10.1038/s41579-023-00926-x

Chasanah, R., & Riyadh, A. (2024). Peran badan permusyawaratan desa dalam perencanaan

pembangunan desa medalem. *Journal Publicuho*, *7*(4), 2351–2367. https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i4.606

Christou, A., Beretsou, V. G., Iakovides, I. C., Karaolia, P., Michael, C., Benmarhnia, T., Chefetz, B., Donner, E., Gawlik, B. M., & Lee, Y. (2024). Sustainable wastewater reuse for agriculture. *Nature Reviews Earth & Environment*, *5*(7), 504–521. https://doi.org/10.1038/s43017-024-00560-y

Chung, Y. H., Church, D., Koellhoffer, E. C., Osota, E., Shukla, S., Rybicki, E. P., Pokorski, J. K., & Steinmetz, N. F. (2022). Integrating plant molecular farming and materials research for next-generation vaccines. *Nature Reviews Materials*, *7*(5), 372–388. https://doi.org/10.1038/s41578-021-00399-5

Fralish, Z., Chen, A., Khan, S., Zhou, P., & Reker, D. (2024). The landscape of small-molecule prodrugs. *Nature Reviews Drug Discovery*, *23*(5), 365–380. https://doi.org/10.1038/s41573-024-00914-7

Ginting, A. H., Widianingsih, I., Mulyawan, R., & Nurasa, H. (2024). Village fund program in Cibeureum and Sukapura village, Bandung Regency, Indonesia: Problems, risks, and solutions. *Cogent Social Sciences*, *10*(1), 2303452. https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2303452

Guerrero, A. (2024). *Lottocracy: Democracy without elections*. Oxford University Press.

Harsanto, B. T., & Wahyuningrat, W. (2024). Investigating the keys to the failure of inter-village government collaboration in developing rural economic potentials in Indonesia. *Regional Science Policy & Practice*, *16*(5), 100023. https://doi.org/10.1016/j.rspp.2024.100023

Hermawansyah, A., Ramli, R., Azmi, I. F., & Muhammad, A. (2023). Analisis pelaksanaan fungsi pengawasan badan permusyawaratan desa terhadap pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Good Governance*, 101–116. https://doi.org/10.32834/gg.v19i2.624

Hilmawan, R., Aprianti, Y., Vo, D. T. H., Yudaruddin, R., Bintoro, R. F. A., Fitrianto, Y., & Wahyuningsih, N. (2023). Rural development from village funds, village-owned enterprises, and village original income. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, *9*(4), 100159. https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100159

Indrawanto, C., Mardiharini, M., Placek, M., Wardhana, I. W., Raharjo, T., Wirawan, A., Ubed, R. S., Saliem, H. P., Sudjarmoko, B., & Ermiati, E. (2025). Determinant factors of BUM Desa (village-owned enterprises) performance in Indonesia: a partial least squares structural equation models approach. *Cogent Business & Management*, *12*(1), 2580028. https://doi.org/10.1080/23311975.2025.2580028

Jiang, Y., Long, H., Tang, Y., Deng, W., Chen, K., & Zheng, Y. (2021). The impact of land consolidation on rural vitalization at village level: A case study of a Chinese village. *Journal of Rural Studies*, *86*, 485–496. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.07.004

Karuniyati, P., Muhammad, A. S., & Mahadiansar, M. (2021). Strategi kemandirian melalui program inovasi desa kuala sempang kabupaten bintan. *Journal Publicuho*, *4*(4), 999. https://doi.org/DOI: 10.35817/jpu.v4i4.20629

Lechner, M., Liu, J., Masterson, L., & Fenton, T. R. (2022). HPV-associated oropharyngeal cancer: epidemiology, molecular biology and clinical management. *Nature Reviews Clinical Oncology*, *19*(5), 306–327. https://doi.org/10.1038/s41571-022-00603-7

Li, Y., He, J., Yue, Q., Kong, X., & Zhang, M. (2022). Linking rural settlements optimization with village development stages: A life cycle perspective. *Habitat International*, *130*, 102696. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2022.102696

Liu, S., Ge, J., Bai, M., Yao, M., He, L., & Chen, M. (2022). Toward classification-based

sustainable revitalization: Assessing the vitality of traditional villages. *Land Use Policy*, *116*, 106060. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106060

Muhtar, E. A., Abdillah, A., Widianingsih, I., & Adikancana, Q. M. (2023). Smart villages, rural development and community vulnerability in Indonesia: A bibliometric analysis. *Cogent Social Sciences*, *9*(1), 2219118. https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2219118

Patnaik, S., Sen, S., & Mahmoud, M. S. (2020). Smart village technology. *Modeling and Optimization in Science and Technologies*, *17*(1), 181–189. https://doi.org/10.1007/978-3-030-37794-6

Praja, S. J., Wulandari, S., Simanjuntak, T. H., Sudrajat, I., & Lambelanova, R. (2025). Bordered by nickel: multi-impact of mining governance on the konawe–north konawe boundary, indonesia. *Society*, *13*(2), 964–984. https://doi.org/10.33019/society.v13i2.942

Riasnugrahani, M., & Analya, P. (2023). *Buku ajar: metode penelitian kualitatif*. Ideas Publishing.

Robert, F. C., Frey, L. M., & Sisodia, G. S. (2021). Village development framework through self-help-group entrepreneurship, microcredit, and anchor customers in solar microgrids for cooperative sustainable rural societies. *Journal of Rural Studies*, *88*, 432–440. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.07.013

Shintawati, E. N., Goo, F., Shofaturrahmah, P. D., & Muksin, A. (2023). Efektivitas pengelolaan dana dekonsentrasi sektor kesehatan di provinsi banten. *Jurnal Syntax Admiration*, *4*(7), 1025–1033. https://doi.org/10.46799/jsa.v4i7.804

Soegiharto, S., Wahyono, E., Najiyati, S., Andari, S., Yusuf, H., Danarti, D., Dewi, R. N., Gunawan, T., & Wijaya, G. (2026). Linking social capital as a mechanism towards self-reliant villages. *Cogent Social Sciences*, *12*(1), 2632978. https://doi.org/10.1080/23311886.2026.2632978

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d*. Alfabeta.

Suhada, D. I., Rahmadani, D. R., Rambe, M., Fattah, M. A. F., Hasibuan, P. F., Siagian, S., & Wulandari, S. (2022). Efektivitas para pelaku ekonomi dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, *2*(10), 3201–3208. https://doi.org/10.47492/jip.v2i10.1315

Suhendro, M. R. (2021). *Efektivitas refocusing anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam penanganan corona virus disease 2019 di kota bandar lampung provinsi lampung*. IPDN Jatinangor.

Syukri, M. (2025). Participatory environmental governance in Indonesia: assessing the limitations. *South East Asia Research*, *33*(4), 435–453. https://doi.org/10.1080/0967828X.2025.2563533

Tohawi, A. (2025). Analisis peran badan permusyawaratan desa dalam sistem pemerintahan desa di indonesia. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, *10*(1), 92–120. https://doi.org/10.53429/iljs.v10i1.1445

Tohawi, A., & Suhaimi, A. (2022). Fungsi legislasi badan permusyawaratan desa. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, *7*(01), 55–72. https://doi.org/10.53429/law.v7i01.501

Xu, Y., Wang, T., Liu, W., Zhang, R., Hu, Y., Gao, W., & Chen, Y. (2023). Rural system sustainability evaluation based on emergy analysis: An empirical study of 321 villages in China. *Journal of Cleaner Production*, *389*, 136088. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.136088

Yanan, L., Ismail, M. A., & Aminuddin, A. (2024). How has rural tourism influenced the sustainable development of traditional villages? A systematic literature review. *Heliyon*,

10(4). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e25627

Yu, C., Zhou, Z., Gao, J., Zhang, X., Zheng, Q., Liu, Z., Ma, Z., He, W., & Wen, S. (2025). Multi-scale comparison of the formation mechanisms in landscape genes of traditional villages. *Scientific Reports*, *15*(1), 4126. https://doi.org/10.1038/s41598-025-87145-x

Zaenul Muttaqin, M., Haris, H., Rifdan, Herman, & Kasmawati, A. (2026). Debate: Towards accountability in the village enterprise accounting system. *Public Money & Management*, *46*(1), 20–22. https://doi.org/10.1080/09540962.2025.2520515

Zang, Y., Hu, S., Zhou, B., Lv, L., & Sui, X. (2023). Entrepreneurship and the formation mechanism of Taobao Villages: Implications for sustainable development in rural areas. *Journal of Rural Studies*, *100*, 103030. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2023.103030

Zhang, Z., Liu, Y., & Liu, G. (2022). Rethinking growth coalition in urban village redevelopment: An empirical study of three villages in Zhuhai, China. *Habitat International*, *121*, 102529. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2022.102529